

TINJAUAN SOSIOLOGIS TENTANG PENTINGNYA AGAMA DALAM PERUBAHAN SOSIAL

Nahriyah Fata

Dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Padangsidempuan

Abstract

In fact, the phenomenon of social change illustrates and explains us that religion is one of the factors of social change itself. Religion became a basic format formation of the culture, how people live and thrive in the community. Religious teachings espoused, will characterize someone's life in society, like or not, intentionally or unintentionally religious values had it could affect him in addressing the social changes occur. The question is whether religion that gives color to change or even religion becomes lost in the change.

Studies in this article to make sense of how religious teaching can provide color in addressing current social changes that were increasingly more complex. A phenomenon that occurs writer temporary observation, religious teachings impressed being abandoned by the people with increased style and model of the changes that occur in people's lives can be widespread phenomenon JIL is factual enough to make Muslim unrest in this country. So through this paper is expected to eventually changes may have occurred, but the teachings of religion are upheld by its adherents as a driving force and source of ultimate truth and would be better serve as a filter against the change.

Key word: religion, changes

A. Pendahuluan

Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat merupakan hal yang tidak bisa dielakkan. Perubahan social dapat berdampak positif dan negative. Untuk memperkecil dampak negative dari perubahan yang ada salah satunya adalah pentingnya ajaran agama sebagai fondasi ideology dalam membentengi perubahan negative tersebut. Sadar atau tidak ajaran agama sangat memberikan pengaruh ruhani yang dalam bagi penganutnya.

Terlepas dari keterikatan perubahan dengan adanya agama, dalam hal ini, menggagas pemikiran tentang hubungan antara agama dan perubahan sosial bertitik-tolak dari pengandaian bahwa perubahan sosial merupakan suatu fakta yang sedang

berlangsung, yang diakibatkan oleh kekuatan-kekuatan yang sebagian besar berada diluar kontrol kita, bahkan terkadang tidak ada kemungkinan sedikitpun untuk menghentikannya.

Dalam hal ini bisa jadi agama yang dianut seseorang akan menjadi penentang, pendukung atau bahkan agama akan hilang ditelan arus perubahan yang ada. Harapan kita tentunya bagaimana perubahan yang terjadi tidak mengabaikan eksistensi agama seseorang, bahkan diharapkan dengan adanya perubahan benteng agama dalam diri manusia semakin kokoh akibat dirasakan makna agama itu sebagai benteng untuk menghindari pengaruh negative perubahan yang ada. Tercapainya hakikat agama sebagai benteng menghadapi perubahan itu tentu perlu kajian panjang tentang bagaimana agama itu hadir dalam setiap denyut nadi penganutnya, juga dalam setiap langkah dan perbuatannya dimana agama dijadikan sebagai dasar kehidupannya.

B. Makna Agama dan Perubahan

Pada hakikatnya seluruh agama menghendaki adanya perubahan dalam setiap kehidupan manusia. “Agama” dan “Perubahan” merupakan dua entitas yang seperti berdiri masing-masing. Namun, belum tentu setiap dua entitas atau lebih, adalah sesuatu yang berbeda atau bahkan berlawanan. Kemungkinan saja dua entitas itu saling melengkapi (complementary), dan boleh jadi saling mensifati satu sama lain. Bisa juga, “agama” dan “perubahan” dipahami sebagai hal yang overlapping. Artinya, “perubahan” dalam pandangan sebagian kalangan, justru dianggap sebagai inti ajaran agama. Sebagian penguat sosiologi dan sosiologi agama, seperti Ibnu Khaldun, Max Weber, Emile Durkheim, Peter L. Berger, Ali Syariati, Robert N. Bellah, dan yang lainnya menyiratkan pandangannya tentang hubungan antara agama dan perubahan sosial. Ali Syariati dalam Syarifudin Jurdi menawarkan : untuk membebaskan dan membimbing rakyat menciptakan cinta dan keyakinan baru, kedinamisan, dan memberikan kesadaran baru ke dalam hati dan pikiran rakyat serta mengingatkan mereka pada bahaya yang muncul akibat kebodohan, ketahyulan, kejahatan dan kebobrokan didalam masyarakat Islam kini adalah harus dimulai dari agama.¹ Ringkasnya untuk menggerakkan laju perubahan dan revolusi dalam masyarakat itu agamalah yang dijadikan dasarnya.

¹ Syarifudin Jurdi, *Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2010, hal. 179.

Makna “perubahan” kemudian dirumuskan oleh agama setidaknya Islam, sebagai keharusan universal – meminjam istilah Islam *sunnnahtullah* – agar dapat merubah dari kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan, ketertindasan dan dari berbagai macam yang bersifat dehumanisasi menuju terwujudnya masyarakat/umat yang berprikemanusiaan dan berperadaban. Paling tidak, agama mengajarkan nilai-nilai seperti itu, selain doktrin-doktrin yang bersifat ritual. Sebab, dapat dibayangkan apabila kehadiran agama di tengah-tengah hingar-bingarnya akselerasi kehidupan manusia tidak dapat menawarkan semangat perubahan, maka eksistensi agama akan menjadi pudar. Dengan kata lain, kalau sudah demikian, tidak mustahil agama akan ditinggalkan oleh umatnya dan boleh jadi belakangan menjadi “gulung tikar” karena dianggap sudah tidak up to date.

Oleh karena itu, diperlukan pemahaman diskursus “agama” di satu sisi, dan “perubahan” di sisi lain — sebagai bagian satu entitas yang tak dapat dipisahkan — sebab yang satu mensifati yang lain. “Perubahan” berfungsi sebagai sifat “kecenderungan”, “titik tekan”, atau “melingkupi” keberadaan agama. Ilustrasi ini dapat diambil contoh dari berbagai peristiwa di belahan dunia tentang perubahan sosial yang diakibatkan eksese dari agama, seperti, revolusi Islam Iran, atau kasus bom Bali di Indonesia.

Identifikasi di atas tidak hanya di fokuskan pada perubahan yang berorientasi progress (arah kemajuan) semata, tetapi ke arah regress (kemunduran) pun menarik untuk dijadikan contoh. Memang tidak selamanya perubahan yang diakibatkan sepaik terjang agama dapat berdampak kemajuan peradaban bagi manusia. Tidak sedikit perubahan yang mengarah pada kemunduran (regress) sebuah peradaban bangsa tertentu — yakni seperti terjadinya perang Salib di masa lalu (antara Islam dan Kristen) atau konflik-konflik yang mengatasnamakan agama.

Sedangkan perubahan yang mengarah pada kemajuan (progress) peradaban manusia, posisi agama pun memberikan kontribusi yang sangat besar. Dengan agama, manusia dapat menebarkan perdamaian dan cinta kasih di antara sesama, optimis dalam menatap masa depan, menciptakan alat-alat teknologi untuk peningkatan kesejahteraan, menegakkan keadilan, sekaligus pemihakan terhadap golongan lemah. Tanpa itu, dapat dipastikan semakin lama sesuai dengan tuntutan zaman, agama akan ditinggalkan oleh pemeluknya dan pada akhirnya “gulung tikar” seperti yang di alami oleh agama-agama

Mesir kuno. Meskipun acap kali tidak mudah untuk mensosialisasikan agama sebagai bagian dari spirit proses perubahan sosial.

Di sisi lain Wach dalam Azyumardi Azra mengatakan diferensiasi yang semakin luas tidak hanya menghasilkan transisi dalam masyarakat tetapi juga memperkuat kecenderungan berkembangnya struktur sekuler dalam masyarakat. Konsekuensinya pengalaman keagamaan masyarakat juga akan mengalami perubahan. Perubahan-perubahan itu menurut Wach tidaklah otonom. Karena perubahan-perubahan itu sebahagiannya digerakkan oleh perubahan-perubahan lainnya dalam masyarakat dan situasi cultural yang mengitarinya. Menurutnya agama kemungkinan mengalami "dialektika batin"nya sendiri² Sehingga dari pikiran Wach ini difahami bahwa struktur cultural masyarakat dapat mempengaruhi perubahan pengalaman keagamaan manusia. Kemungkinan ini dapat terjadi bila pemeluk agama seperti itu memiliki kecenderungan yang lemah tentang tatanan yang dibangun oleh fondasi agamanya.

Sejalan dengan apa yang dikatakan Beni Ahmad Saebani perilaku manusia yang terbentuk oleh norma-norma masyarakat tidak berarti sebagai potensi dirinya secara cultural dinafikan begitu saja, justru potensi cultural individu itu diadaptasikan dan diintegrasikan secara sosialistik sehingga menjadi system social yang muatan simboliknya diterima dan menjadi ciri khas masyarakat tertentu.³

Dengan demikian pembentukan dan perubahan masyarakat secara serta merta merupakan pemolaan karakteristik budaya yang memiliki daya ikat, daya atur dan daya gerak tersendiri bagi masyarakatnya. Akibatnya meski sumber ajaran agamanya secara universal sama belum tentu volume perubahan yang terjadi di masyarakat persis sama, sedikit banyak akan memiliki titik perbedaan dan kekhasan tersendiri.

C. Agama Sebagai Sebab Terjadinya Perubahan

Dalam memaknai perubahan yang ada secara konsep dan fakta sejarah tak dapat dipungkiri bahwa ajaran agama dapat menjadi sebab musabab terjadinya suatu perubahan dalam masyarakat. Secara sosiologis munculnya semangat perubahan sosial di Indonesia, biasanya lebih difokuskan pada dinamika sosial yang berkembang, meskipun pada gilirannya hampir semua aspek dapat pula menjadi pemicu arah

²Azyumardi Azra, *Reposisi Hubungan Agama dan Negara*, Kompas, Jakarta:2002,hal. 196.

³ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Agama*, Refika Aditama, Bandung:2007,hal.1

perubahan itu sendiri. Bahkan sebagaimana sosiolog sependapat, bahwa perubahan di semua sektor merupakan keharusan yang tidak dapat ditawar dan ditunda-tunda, kendatipun dalam proses perjalanannya diketemukan kendala-kendala yang tidak ringan. Sebut saja, mulai dari perubahan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, agama dan berbagai macam yang menyangkut kehidupan bangsa Indonesia.

Hamka dalam Saebani mengatakan bahwa ajaran agama memiliki pengaruh yang besar dalam penyatuan persepsi kehidupan masyarakat tentang semua harapan hidup. Sebagai salah satu arah kehidupan social yang proses pemolaannya lebih sistematis dan mendarah daging. Dalam pemolaan prilaku social agama memasuki hati nurani manusia sehingga akal pikiran utama mencari makna hidup belum sempurna apabila substansi ajaran agama tidak dijadikan rujukan terpenting setelah epistemologis maupun aksiologis⁴

Kehadiran agama secara fungsional, mempunyai watak sebagai “perekat sosial”, memupuk solidaritas sosial, toleran, dan seperangkat peranan yang memelihara kestabilan sosial (harmoni). Di sisi lain, agama juga mempunyai kecenderungan atomisasi (memecah-belah), disintegrasi, dan intoleransi. Secara teoritis-sosiologis, hal ini dapat juga difahami dari dua bentuk antagonisme dalam agama. Pertama, ketegangan atau konflik yang berkembang di kalangan umat suatu agama (intern). Kedua, ketegangan atau konflik yang terjadi antar umat beragama (ekstern).

Sosiolog Prancis Emile Durkheim dalam Saebani memusatkan telaahnya pada unsure-unsur social yang menghasilkan solidaritas dan agama dilihatnya sebagai factor esensial bagi identitas dan integritas masyarakat. Agama dipandang sebagai interpretasi diri kolektif.⁵ Agama bagi mereka bukanlah persoalan individu melainkan representasi kolektif dari masyarakat. Mereka menekankan bahwa agama pertama-tama adalah aksi bersama dari masyarakat dalam bentuk ritual-ritual, upacara keagamaan, larangan-larangan praktis. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masyarakat secara positif berperan dalam terbentuknya atau munculnya agama.

Di lain pihak Karl Marx memandang kemunculan agama sebagai reaksi manusia atas keadaan masyarakat yang ‘rusak’. Menurutnya agama adalah candu masyarakat. Masyarakat digerakkan oleh kecintaan terhadap ruh agama yang diyakininya secara melekat. Keterkaitan yang demikian erat antara agama dan masyarakat ini berdampak

⁴Ibid, hal.2.

⁵ Ibid,hal.6.

pada pemanfaatan fungsi kolektif agama untuk menggerakkan masyarakat demi perubahan sosial atau juga demi tujuan tertentu yang entah menguntungkan atau merugikan masyarakat itu sendiri.

Untuk beberapa kasus di Indonesia, semisal keberadaan agama Islam dengan kecenderungan dan intensitas perubahannya, dapat ditelaah melalui pengamatan yang serius, baik melalui umatnya maupun kiprah institusi-institusinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selintas terkesan kegairahan menghayati agama meningkat, terutama di kalangan masyarakat perkotaan yang nota-bene terdidik. Atau paling tidak pendidikannya relatif sudah mapan. Kenyataan ini tidak memberikan jaminan dan mungkin masih diragukan, apakah ini mencerminkan bertumbuhnya kekuatan agama (Islam) atau sebaliknya? Sebab hal ini berbarengan dengan indikasi krisis kepercayaan sebagian umat Islam terhadap lembaga-lembaga politik (parpol) yang bernuansa agama (Islam) dan adanya “tekanan-tekanan” terhadap para penganutnya.

Dari kenyataan demikian, nampak adanya “ideologi” yang dapat menyaingi keberadaan agama (Islam). Indikasi ini lebih diperkuat dengan cara menghayati agama, di mana penghayatan dirasakan cukup apabila sudah melaksanakan kewajiban pribadinya dalam beribadah. Sedangkan tanggung jawab sosialnya kurang mendapat perhatian. Padahal semestinya ajaran agama bukan sekedar ibadah individual kepada Tuhan akan tetapi kewajiban kerja kemanusiaan atau amal shaleh dalam agama (Islam) lebih ditekankan.

Merujuk pada perspektif di atas, memang perubahan sosial di Indonesia sampai sekarang pun seiring dengan ritme perjalanan sejarahnya, yakni meliputi bidang agama, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan berbagai bidang kehidupan yang lain. Perwujudan yang kongkrit dari perubahan itu, adalah berupa upaya pembangunan yang terencana, termasuk di dalamnya sumber daya manusia. Tetapi dalam implementasinya, proses pembangunan tidak jarang menimbulkan disorientasi, seperti alienasi (keterasingan dan kerenggangan) dan dehumanisasi (“penjungkirbalikan” nilai-nilai kemanusiaan) bahkan konflik horisontal pun yang tak kunjung selesai. Semua itu, akibat dari pola pembangunan yang lebih memprioritaskan aspek fisik atau kebendaan semata. Dehumanisasi semakin marak – eksekusi dari proses pembangunan yang mementingkan praktis-pragmatis di atas nilai-nilai kemanusiaan. Manusia tidak lebih dari obyek pembangunan ketimbang subyek pembangunan.

Kenyataan ini, pada gilirannya dapat menciptakan semangat penolakan dan perlawanan dari pihak yang merasa dimarginalkan. Teori sosiologi mendeskripsikan bahwa semakin kuatnya tekanan terhadap keberadaan kelompok tertentu, maka akan semakin mempercepat munculnya semangat militansi untuk mempertahankan eksistensinya. Begitu halnya di Indonesia, semakin represif para penguasa (semisal di era rezim Orba) membatasi aktivitas umat Islam, yang pada gilirannya semakin tumbuh subur munculnya aliran-aliran yang bernuansa radikalisme. Perubahan yang dihendaki oleh kelompok radikal keagamaan, biasanya cenderung revolusioner dan mendasar. Mereka beranggapan, bahwa dengan merubah secara mendasar seluruh aspek kehidupan manusia dan sekaligus melawan dari segala bentuk penindasan dan ketidakadilan, adalah sesuatu perwujudan kewajiban religius yang harus dilaksanakan.

D. Agama dan Perubahan Ekonomi

Pada zaman keemasan Islam (the Golden Age of Islam), yaitu pada abadke-7 sampai ke 14, ekonomi dan agama itu bersatu. Sampai akhir tahun 1700-an di Barat pun demikian, ekonomi berkait dengan agama. Ahli ekonomi Eropa adalah pendeta. Pada zaman pertengahan, ekonomi skolastik dikembangkan oleh ahli gereja, seperti Thomas Aquinas, Augustin, dan lain-lain. Namun karena adanya revolusi industri dan produksi massal, ahli ekonomi Barat mulai memisahkan kajian ekonomi dari agama. Keadaan ini merupakan gejala awal revolusi menentang kekuasaan gereja dan merupakan awal kajian ekonomi yang menjauhkan dari pemikiran ekonomi skolastik. Sejak itu, sejarah berjalan terus sampai pada keadaan di mana pemikiran dan kajian ekonomi yang menentang agama mulai mendingin. Para ekonom kontemporer mulai mencari lagi sampai mereka menyadari kembali betapa pentingnya kajian ekonomi yang berkarakter religius, bermoral, dan human.

Agama dan ekonomi memiliki hubungan yang berkesinambungan. Kegiatan ekonomi yang baik dalam kehidupan bermasyarakat akan berlandaskan pada kaidah-kaidah agama. Perilaku produksi, distribusi, maupun konsumsi akan menunjukkan hal yang positif jika didasari oleh kekuatan agama. Kegiatan ekonomi yang demikian tidak akan menimbulkan kerugian pada masyarakat. Manusia diperbolehkan mencari harta sebanyak-banyaknya karena tidak ada satupun agama yang melarangnya. Namun yang perlu diperhatikan adalah apakah proses pencapaian itu sudah benar atau belum, sesuai

dengan keyakinan agama atau tidak. Agama juga memerintahkan manusia untuk menjalankan pola kerja yang baik, perilaku konsumsi yang benar, dan hal-hal lain bersifat positif. Jika dalam melakukan kegiatan ekonomi orang tidak didasari oleh kekuatan agama, maka yang timbul adalah kecurangan-kecurangan pola kerja yang tidak baik, kolusi, dan nepotisme, serta hal-hal lain yang sifatnya destruktif.⁶

Sistem Ekonomi Indonesia, mengacu pada kesepakatan Sumpah Pemuda 1928. Sistem Ekonomi Indonesia aturan main yang mengatur seluruh warga bangsa untuk bertunduk pada pembatasan-pembatasan perilaku sosial-ekonomi setiap orang demi tercapainya tujuan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Aturan main perekonomian Indonesia berasas kekeluargaan dan berdasarkan demokrasi ekonomi, yaitu produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan dan penilikan anggota-anggota masyarakat. Dalam Sistem Ekonomi Indonesia yang demokratis kemakmuran masyarakat lebih diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, sehingga dapat dihindari kondisi kefakiran dan kemiskinan.⁶

Rodney Wilson⁷ mengemukakan bahwa di Indonesia, meskipun Islam merupakan agama mayoritas, sistem ekonomi Islam secara penuh sulit diterapkan, tetapi Sistem Ekonomi Pancasila yang dapat mencakup warga non Islam kiranya dapat dikembangkan. Merujuk sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, Sistem Ekonomi Pancasila menekankan pada moral Pancasila yang menjunjung tinggi asas keadilan ekonomi dan keadilan sosial seperti halnya sistem ekonomi Islam. Tujuan Sistem Ekonomi Pancasila maupun sistem ekonomi Islam adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang diwujudkan melalui dasar-dasar kemanusiaan dengan cara-cara yang nasionalistik dan demokratis. Di Indonesia jika Pancasila kita terima sebagai ideologi bangsa maka sistem ekonomi nasional tentu mengacu pada Pancasila, baik secara utuh (gotong royong, kekeluargaan) maupun mengacu pada setiap Silanya:

1. Ke-Tuhanan Yang Maha Esa: Perilaku setiap warga Negara digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab: Ada tekad seluruh bangsa untuk mewujudkan pemerataan nasional;
3. Persatuan Indonesia: Nasionalisme ekonomi;

⁶ <http://id.shvoong.com>

⁷ Rodney Wilson, *Economics, Ethics and Religion*, Macmillan, 1997. h. 211

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan: Demokrasi Ekonomi;dan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia: Desentralisasi dan Otonomi Daerah.

Merujuk sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, Sistem Ekonomi Pancasila menekankan pada moral Pancasila yang menjunjung tinggi asas keadilan ekonomi dan keadilan sosial seperti halnya sistem ekonomi Islam. Tujuan Sistem Ekonomi Pancasila maupun sistem ekonomi Islam adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang diwujudkan melalui dasar-dasar kemanusiaan dengan cara-cara yang nasionalistik dan demokratis. Di Indonesia jika Pancasila kita terima sebagai ideologi bangsa maka sistem ekonomi nasional tentu mengacu pada Pancasila, baik secara utuh (gotong royong, kekeluargaan) maupun mengacu pada setiap Silanya:

Ajaran agama Islam dalam perilaku ekonomi manusia dan bisnis Indonesia makin mendesak penerapannya bukan saja karena mayoritas bangsa Indonesia beragama Islam, tetapi karena makin jelas ajaran moral ini sangat sering tidak dipatuhi. Dengan perkataan lain penyimpangan demi penyimpangan dalam Islam jelas merupakan sumber berbagai permasalahan ekonomi nasional.

Kajian ekonomi pada abad ini (the age of reason) bertolak pada pemikiran ilmu ekonomi yang lebih terandalkan dalam menjaga keselamatan seluruh manusia dan alam semesta. Ekonomi yang memiliki nilai-nilai kebenaran (logis), kebaikan (etis), dan keindahan (estetis). Ekonomi yang dapat membebaskan manusia dari aksi penindasan, penekanan, kemiskinan, kemelaratan, dan segala bentuk keterbelakangan, serta dapat meluruskan aksi ekonomi dari karakter yang tidak manusiawi, yaitu ketidakadilan, kerakusan, dan ketimpangan. Ekonomi yang secara historis-empiris telah terbukti keunggulannya di bumi ini tidak bebas atau tidak dapat membebaskan diri dari pengadilan nilai, yaitu nilai yang bersumber dari agama (value committed), dialah ekonomi Syariah.⁸ Dan kini, Indonesia pun sedikit demi sedikit mulai beralih pada system ekonomi syari'ah. Yang sistemnya dapat menguntungkan kedua belah pihak.

⁸ erlan-abuhanifa.blogspot.com/.../ekonomi-dan-agama

E. Agama dan Perubahan Teknologi Informasi

Teknologi macam apa yang akan mengisi dunia kita? Ada sepuluh jenis teknologi menurut pakar futuristic yang akan mengantarkan peradaban umat manusia dalam memasuki abad ke 21. Teknologi yang dimaksud adalah kendaraan dengan bahan bakar hydrogen, superkonduktor suhu tinggi, rekayasa genetika, bionika, telepon pribadi universal, computer yang dibangkitkan suara, nanoteknologi, elektronika optic, Virtual Reality (VR) dan bahan baru. Dan dari sepuluh teknologi itu separuhnya sangat terkait erat dengan seluk beluk teknologi komunikasi, computer dan system pengelolaannya.⁹

Manusia dewasa ini sedang berada dalam suatu revolusi baru yaitu revolusi informasi (byte bang). Dan jantung dari revolusi informasi sering disebut revolusi siber (cyberrevolution) adalah computer. Melek computer ini mengantarkan masyarakat Indonesia mengalami demam internet. Meskipun biaya internet di Indonesia terbilang masih mahal, para pengguna teknologi ini baik dari kalangan pribadimaupun ; lembaga sudah cukup banyak. Dan bila mengamati secara cermat tentang kecenderungan penggunaan sarana prsarana telekomunikasi (telepon dan radio misalnya) yang semakin hari semakin meningkat. Majalah Gatra edisi 2 Desember 1995 sebagaimana dikutip Chairil Anwar Seks dan politik di Internet. Harian Republika dan media massa lainnya sudah memasang kapling homepage di internet. Demikian juga lembaga lainnya baik pemerintah dan swasta.¹⁰

Peradaban ummat manusia menjelang akhir abad 20 ini merupakan era teknologi informasi yang sangat canggih. Sebagaimana yang diungkapkan John Naisbitt dalam Chairil Anwar⁹ we are moving toward the capability to communicate anything to anyone, anywhere, anyform-voice, data text or emage at the speed of light (Kita sedang bergerak ke arah kemampuan berkomunikasi apa saja kepada siapa saja pun, dimana pun, berbentuk apa pun, baik itu suara, data tulisan atau gambar (citra) dengan menggunakan kecepatan suara.¹¹

Itulah gambaran era informasi yang mengglobal dan yang menghadang di hadapan kita (umat Islam) dimana pun berada di muka bumi ini. Di eraini, kita akan

⁹ Chairil Anwar, Islam dan tantangan Kemanusiaan abad ke XXI, Pustaka Pelajar, Yogyakarta:2000, hal.63

¹⁰ Ibid, hal 64

¹¹ Ibid, hal 64-65

mengetahui dengan sangat jelas keberadaan umat islam yang sebenarnya di seluruh penjuru dunia. Dalam waktu yang relative singkat semua informasi dapat diinput dengan lengkap. Bagaimana Islam melihat fenomena ini? Islam tidak pernah melarang penggunaan computer dan teknologi informasi lainnya sepanjang dapat memberikan nilai dalam upaya pengabdian seorang hamba kepada Sang Pencipta. Dan Islam sangat antisipatif terhadap manfaat yang diperoleh dari informasi tersebut.

Mari kita perhatikan firman Allah dalam Q.S 57: 22

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلٍ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٢٢﴾

Artinya: tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.

Hal ini menunjukkan bahwa tidak satu byte pun informasi yang dilewatkan Allah. Betapa besar memori kitab Allah itu dan bagaimana cara mengatur lalu lintas informasi yang luar biasa dan banyaknya dan ragamnya? Allah benar-benar Maha Kuasa dan Maha Besar. Namun demikian perlu kajian mendalam tentang sisi negatif dan positif informasi yang berkembang melalui teknologi informasi sebagaimana yang telah merebak di seantero bumi Allah ini. Sebagaimana yang telah kita saksikan bersama tentang pengaruh teknologi terhadap pola hidup manusia. Dilihat dari sisi positifnya teknologi informasi dapat memberikan kemudahan terhadap etos kerja, menjamin efisiensi, menaikkan produktifitas dan mempercepat pencapaian aplikasi suatu teknologi dalam kehidupan umat manusia. Ini sejalan dan sesuai dengan konsep Islam. Dalam Alqur'an disebutkan :

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٢٤﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٢٥﴾

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya. dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula.

Bagaimana kebaikan dan keburukan diukur dengan zarrah. ? Apakah Allah SWT mengandaikan kepada kita tentang adanya kekekalan informasi? Bahwa informasi itu tidak pernah musnah dan tidak bias dihilangkan. Apakah ini merupakan gambaran efisiensi informasi maksimal? Karena itu perlu dikembangkan system dakwah yang

menggunakan dan memilih teknologi informasi yang efisiensi dan bersih sesuai dengan kodrat umat manusia. Sudah tiba saatnya dimana para da'I mendapat tantangan yang sangat kompleks untuk mencari solusi dalam memberikan problema solving dan upaya ini tentu akan menjadi lahan pahala yang sangat besar. Karena mereka akan mengemban tugas yang amat berat dan di pundak mereka bergantung sedikit banyak citra Islam dalam pandangan masyarakat luas. Bila mereka dapat menterjemahkan pesan Islam sesuai dengan manajemen dakwah yang modern, efektif dan bias diterima masyarakat sebagai pencerahan hati dan fikir mereka Islam akan meluas jangkauannya dan mudah dimengerti serta tidak disalah mengertikan terutama oleh saudara-saudara non muslim.

F. Pentingnya Agama Sebagai Benteng Perubahan

Beberapa contoh kasus di Indonesia yakni, perubahan sosial yang dilandasi oleh semangat keagamaan seringkali menghadirkan pro-kontra di kalangan masyarakat. Sebagian masyarakat beranggapan, bahwa agama semestinya banyak mengambil peran dalam berbagai aspek, terutama dalam rangka pengendalian masyarakat (social control). Mereka berdalih, bahwa agama menjadi bagian yang tak terpisahkan dari berbagai aktivitas kehidupan sosial di Indonesia. Kenapa? Sebab mayoritas rakyat Indonesia adalah beragama. Kemudian masalah berkembang, yakni agama mana yang layak menjadi dominan mempengaruhi pola perilaku masyarakat? Pernyataan terakhir ini, dapat didiskusikan dalam konteks logika kekuasaan dengan lebih intens.

Sementara bagi sebagian masyarakat yang tidak menghendaki agama hadir di berbagai moment, beranggapan, agama adalah urusan privat dan sangat personal. Urusan yang berkaitan dengan persoalan seperti, politik, ekonomi, budaya, dan semua yang ada kaitannya dengan publik, maka tidak menjadi kemestian agama dilibatkan, apalagi agama tertentu. Semisal, kasus RUU APP, poligami dan lain sebagainya, merupakan potret fenomena komunitas yang berpaham perlunya pemisahan antara urusan agama pada satu sisi, dan urusan sosial di sisi lain. Komunitas ini berpendapat, untuk menjaga keutuhan bangsa tidak diperlukan kehadiran agama apapun dalam konstelasi pembangunan bangsa. Apalagi Indonesia menurut mereka, tidak mengenal paham teokrasi (negara agama).

Yang menjadi masalah kemudian adalah, apakah keberadaan agama cukup kita hadirkan hanya dalam urusan yang sifatnya privat/personal dan domestik. Dengan begitu, jargon keutuhan bangsa adalah harga mati dan mutlak harus dikedepankan ketimbang menjadikan agama tertentu sebagai pedoman atau norma pergaulan sosial. Ataukah dengan menghadirkan agama sebagai landasan norma bernegara dan berkebangsaan dapat menjamin akan adanya ketertiban masyarakat pada umumnya. Untuk memastikan survival-nya di antara kedua paham ini, sebetulnya lebih ditentukan oleh “seleksi alam”, artinya, paham mana yang dapat menjamin ketertiban dan kelangsungan hidup masyarakat pada umumnya dan paham mana yang hanya sebatas psedo-ideologi semata.

Dalam konteks pergolakan politik di Indonesia, belakangan ini banyak mengalami perubahan yang sangat signifikan. Semenjak pasca Orba, keberadaan partai politik yang bernuansa agama bermunculan seperti jamur di musim hujan. Kebanyakan mereka berpandangan bahwa, “idealisme-religiusitas” akan bisa digulirkan apabila memaksimalkan partisipasi politik secara langsung. Bagi mereka, pelajaran paling berharga adalah marginalisasi aspirasi politik partai bernuansa agama di era Orba. Oleh karena itu, peluang di era reformasi ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mewujudkan “obsesi” berpolitik dengan melibatkan agama secara eksplisit.

Terlepas dari apakah adanya partai politik aliran ini, hanya sekedar menarik minat partisipasi masyarakat beragama untuk kepentingan kekuasaan kelompok tertentu atau murni untuk mewujudkan sebuah refleksi semangat religiusitas. Maksud dari asumsi terakhir ini adalah, mendirikan partai politik agama dalam rangka merubah keberadaan masyarakat dengan nilai-nilai agama sebagai sumber utama untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang jelas, semenjak partisipasi politik keagamaan dilembagakan, memberikan warna tersendiri dalam percaturan politik di Indonesia. Paling tidak, dalam konteks demokrasi modern, fenomena yang demikian ini menjadi “batu uji” sebuah makna sejati dari demokrasi.

Masalah lain yang tidak kalah pentingnya untuk didiskusikan adalah, Indonesia yang dikenal mayoritas beragama, belum nampak terrefleksikan dalam perilaku sehari-hari. Agama mungkin hanya sebatas identitas formalistis semata (melengkapi administrasi KTP). Pernyataan ini sepertinya “sumir” dan “sinisme” untuk masyarakat beragama pada umumnya. Tetapi ditilik dari realitas yang berkembang, banyak indikasi

yang mendukung pernyataan ini, semisal merebaknya kasus KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) di seantero Nusantara. Padahal “oknum” yang melakukan praktek KKN notabene beragama, bahkan mungkin lebih terdidik. Hal ini menandakan bahwa “nafsu sawat” materialisme lebih dominan ketimbang semangat keberagamaan. Dari konteks yang demikian ini, ternyata keberadaan agama di Indonesia belum dapat mengejawentah dalam proses perubahan sosial ke arah yang lebih progres atau lebih baik.

Atas dasar demikian, proses perubahan sosial tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab seluruh masyarakatnya, terutama para pemeluk agama. Dalam konteks sosiologis (fungsional-struktural), merubah masyarakat ke arah yang lebih baik dan produktif, merupakan sebuah keharusan yang tidak dapat dihindari. Dengan kata lain, umat beragama dengan semangat ajarannya, bukan saja memikul tanggung jawab untuk memperkuat nilai-nilai moral, etik dan spiritual sebagai landasan pembangunan, tetapi juga dituntut untuk memerankan fungsi inspiratif, korektif, kreatif dan integratif agama ke dalam proses keharmonisan sosial. Berhubungan dengan itu, tugas merubah kondisi sosial ke arah yang lebih baik, bukan sekedar sebagai tugas kemanusiaan, akan tetapi sekaligus merupakan pengamalan sejati ajaran setiap agamanya.

Teori keagamaan Emile Durkheim sebagaimana diuraikan di atas menyatakan fungsi agama sebagai pemersatu masyarakat. Agama bagi Durkheim adalah sebuah kekuatan kolektif dari masyarakat yang mengatasi individu-individu dalam masyarakat. Setiap individu, sebaliknya, merepresentasikan masyarakat dalam agama, yaitu melalui ketaatan kepada aturan-aturan keagamaan, misalnya dengan menjalankan ritual-ritual keagamaan. Agama, dengan demikian, menjadi tempat bersatunya individu-individu, bahkan ketika terjadi banyak perbedaan antara individu karena agama sebagai kekuatan kolektif masyarakat bersifat mengatasi kekuatan-kekuatan individual. Selain itu, agama juga turut menjawab masalah, persoalan dan kebutuhan hidup pribadi atau individu tertentu. Dalam agama, individu merasa dikuatkan dalam menghadapi derita, frustrasi, dan kemalangan. Melalui upacara keagamaan, individu dapat membangun hubungan yang khusus dengan Yang Ilahi. Ritus-ritus itu memberi jaminan akan hidup, kebebasan dan tanggung jawab atas nilai-nilai moral dalam masyarakat. Tidak hanya itu, agama juga berfungsi untuk menjalankan dan menegakkan serta memperkuat perasaan dan ide kolektif yang menjadi ciri persatuan masyarakat. Dengan demikian menjadi jelas bahwa

agama dapat menjadi kekuatan yang menyatukan masyarakat, bahkan jika terjadi banyak perbedaan antar individu atau golongan, apalagi jika terdapat artikulasi kepentingan-kepentingan yang membuahkan ideologi bersama. Dalam hal menyatukan masyarakat ritual-ritual keagamaan mempunyai tempat yang vital. Melalui ritual-ritual keagamaan individu-individu dalam masyarakat disatukan oleh kekuatan moral dan sentimen moral maupun sosial.

G. Penutup

Demikian pentingnya agama dalam menghadapi ragam perubahan yang terjadi di masyarakat ini. Kiranya ia dapat berfungsi sebagai penyelaras kehidupan di muka bumi ini. Agama dikatakan sebagai sebab perubahan, tentunya menjadi perubah ke arah yang lebih baik dan progress. Karena agama khususnya Islam sendiri menekankan empat sifat sekaligus, yakni: 1. Kesatuan (unity), 2. Keseimbangan (equilibrium), 3. Kebebasan (free will), 4. Tanggungjawab (responsibility).

Mengenai persoalan agama dapat menimbulkan perpecahan, itu bukanlah kesalahan ajaran, namun pepacahan terjadi karena ada oknum-oknum yang mengatasnamakan agama untuk kepentingan organisasi semata, karena pada dasarnya tidak ada satu agamapun yang menghendaki hal demikian.

Agama berperan dalam beragam aspek, salah satu aspek informasi dan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang baik dalam kehidupan bermasyarakat akan berlandaskan pada kaidah-kaidah agama. Perilaku produksi, distribusi, maupun konsumsi akan menunjukkan hal yang positif jika didasari oleh kekuatan agama. Kegiatan ekonomi yang demikian tidak akan menimbulkan kerugian pada masyarakat. Manusia diperbolehkan mencari harta sebanyak-banyaknya karena tidak ada satupun agama yang melarangnya. Kegiatan ekonomi yang secara historis-empiris telah terbukti keunggulannya di bumi ini tidak bebas atau tidak dapat membebaskan diri dari pengadilan nilai, yaitu nilai yang bersumber dari agama (value committed), dialah ekonomi Syariah.

Kiranya dengan tulisan sederhana ini kita akan dapat meminimalisir dampak negatif perubahan yang terjadi dengan menjadikan agama sebagai benteng pertahanan dan fondasi menghadapi perubahan itu. Amiiin ya robbal alamiin.

Daftar Pustaka

- Azyumardi Azra, *Reposisi Hubungan Agama dan Negara*, Kompas, Jakarta:2002.
- Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Agama*, Refika Aditama, Bandung:2007.
- Chairil Anwar, *Islam dan tantangan Kemanusiaan abad ke XXI*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta:2000.
- erlan-abuhanifa.blogspot.com/.../ekonomi-dan-agama
- <http://id.shvoong.com>.
- Rodney Wilson, *Economics, Ethics and Religion*, Macmillan, 1997.
- Syarifudin Jurdi, *Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2010.